

MANDAT KERJA DALAM KEJADIAN 1:28 SEBAGAI DASAR MODERASI BERAGAMA: TAFSIR ULANG TEOLOGIS KRISTEN UNTUK KERUKUNAN LINTAS IMAN DI INDONESIA

Yohanis Ndapamuri
Sekolah Tinggi Teologi Levinus Rumaseb Sentani
milairatujohn@gmail.com

ABSTRACT

*One of the fundamental problems that hinders the realization of religious moderation in Indonesia is the dominance of exclusive religious perspectives. This condition causes interreligious interactions to often get stuck on a symbolic level and do not result in a deep understanding. To respond to this problem, this article proposes a constructive effort, namely a rereading of God's mandate in Genesis 1:28 (cultural mandate) and making it a practical foundation for religious harmony. Using a qualitative biblical theological approach and exegesis methods that highlight the words *kabash* and *radah*, this study yields three main findings: human dignity as *imago Dei*, mandate as stewards of nature, and the need for synergy. These three findings suggest that cultural mandates have cross-faith reach that transcends doctrinal boundaries. Therefore, a significant contribution of this paper is to shift the orientation of dialogue from efforts to standardize trust to the spirit of sharing responsibility in real action. This research is expected not only to enrich literacy about religious moderation, but also to become a foothold for collaborative initiatives between religious communities based on a shared concern for the universe.*

Keywords: *Religious Moderation, Work Mandate, Genesis 1:28, Christian Theology, Interfaith Harmony.*

ABSTRAK

Salah satu problematika mendasar yang menghambat terwujudnya moderasi beragama di Indonesia adalah dominasi cara pandang keagamaan yang eksklusif. Kondisi ini menyebabkan interaksi antaragama sering kali terjebak pada tataran simbolik dan tidak menghasilkan pemahaman yang mendalam. Untuk merespons persoalan tersebut, artikel ini mengusulkan sebuah upaya konstruktif, yaitu melakukan pembacaan ulang terhadap amanat Allah dalam Kejadian 1:28 (mandat budaya) dan menjadikannya sebagai fondasi praktis bagi kerukunan umat beragama. Menggunakan pendekatan teologi biblikal kualitatif dan metode eksegesis yang menyoroti kata *kabash* dan *radah*, kajian ini menghasilkan tiga temuan pokok: martabat manusia sebagai *imago Dei*, amanat sebagai penatalayan alam, dan keharusan untuk bersinergi. Ketiga temuan ini menunjukkan bahwa mandat budaya memiliki daya jangkauan lintas iman yang melampaui batasan-batasan doktrinal. Oleh karena itu, kontribusi signifikan dari tulisan ini adalah menggeser orientasi dialog dari upaya menyeragamkan kepercayaan menuju semangat berbagi tanggung jawab dalam tindakan nyata. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literasi tentang moderasi beragama, tetapi juga menjadi pijakan bagi inisiatif-inisiatif kolaboratif antarumat beragama yang berlandaskan pada kepedulian bersama terhadap alam semesta.

Kata Kunci: *Moderasi Beragama, Mandat Kerja, Kejadian 1:28, Teologi Kristen, Kerukunan Lintas Iman.*

PENDAHULUAN

Indonesia, dengan segala kemajemukan agama, etnis, dan budayanya, telah menetapkan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai landasan ideologis sejak kelahirannya sebagai bangsa. Falsafah ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan kekayaan yang harus disyukuri. Namun, kenyataan berkata lain. Perjalanan bangsa ini dalam beberapa dekade terakhir diwarnai oleh deretan panjang kasus intoleransi dan aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Data dari Setara Institute mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2020, tidak kurang dari 180 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tercatat, dengan mayoritas menysasar kelompok minoritas (Setara Institute, 2021). Meskipun secara angka mengalami penurunan, eskalasi kekerasan dalam setiap peristiwa justru menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Kekerasan fisik, perusakan rumah ibadah, dan pembubaran kegiatan keagamaan menjadi pemandangan yang semakin lumrah. Ini adalah bukti bahwa moderasi beragama masih menjadi impian yang belum terwujud. Padahal, tanpa moderasi, masyarakat yang heterogen seperti Indonesia akan terus berjalan di atas gunung es, damai di permukaan, namun bergejolak di bawah, siap meledak menjadi konflik kapan saja.

Beberapa peristiwa dalam kurun waktu dekat mempertegas betapa pentingnya moderasi ditegakkan. Pada 27 Juni 2025, sebuah retret pemuda Kristen di Cidahu, Sukabumi, dibubarkan secara paksa. (HAM, 2025) Aksi ini tidak berhenti pada penghentian kegiatan, tetapi berlanjut pada perusakan properti, rumah singgah, kendaraan, dan simbol-simbol salib. Komnas HAM dalam siaran persnya mengecam tindakan tersebut dan menilainya sebagai indikasi menguatnya gelombang intoleransi yang berbahaya bagi masa depan keberagaman Indonesia (Komnas HAM, 2025). Kasus serupa bermunculan di berbagai penjuru negeri dengan warna yang berbeda. Di Desa Pegundan, Petarukan, Pemalang, pada 24 Juli 2025, sekelompok orang membubarkan acara pengajian dan haul tokoh agama. Komnas HAM (HAM, 2025) mencatat ini sebagai salah satu dari banyak peristiwa intoleransi yang terus berulang di Jawa Tengah.

Menggali lebih dalam akar persoalan, Komnas HAM (HAM, 2025b) mengidentifikasi tiga penyebab struktural utama. *Pertama*, minimnya literasi kebhinekaan dan hak asasi manusia di kalangan masyarakat bawah, yang diperburuk oleh gencarnya propaganda keagamaan eksklusif di ruang publik. *Kedua*, kegagalan sistemik dalam penegakan hukum yang menciptakan budaya impunitas, pelanggar hukum merasa aman karena nyaris tidak pernah dijatuhi sanksi berarti. *Ketiga*, keengganan pemerintah daerah untuk secara aktif melindungi hak-hak keagamaan warganya. Selain itu, International Christian Concern (2026) mencatat kasus pelarangan perayaan Natal dan Tahun Baru bagi jemaat GMII Church Bethlehem di Jonggol oleh pemerintah desa Sukasirna, yang mendapat dukungan dari Satpol PP dan MUI setempat. Tanpa diberikan pilihan tempat ibadah alternatif, jemaat kehilangan kesempatan untuk menjalankan tradisi keagamaan mereka, sebuah pelanggaran hak fundamental yang seharusnya dijamin negara.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong moderasi beragama, baik melalui kebijakan pemerintah maupun inisiatif keagamaan. Namun, sebagian besar pendekatan yang ada masih bersifat normatif-etis. Artinya, moderasi lebih banyak dibicarakan sebagai nilai atau slogan, tanpa menyediakan jembatan praktis yang memungkinkan kolaborasi nyata antarumat beragama. Dalam konteks teologi Kristen, misalnya, diskursus tentang moderasi beragama hampir selalu bertumpu pada etika kasih (Matius 22:39) dan rekonsiliasi (2 Korintus 5:18-19). Kedua pendekatan ini, meskipun memiliki nilai teologis yang dalam, masih terbungkus dalam narasi khas Kristen sehingga sulit menjadi bahasa bersama dalam dialog lintas iman (Heriyanto, 2025).

Di sinilah letak celah penelitian yang signifikan. Belum banyak penelitian yang secara khusus menghubungkan mandat kerja (Kejadian 1:28) dengan moderasi beragama di

Indonesia. Sebagian besar kajian tentang moderasi beragama dalam perspektif Kristen masih bertumpu pada etika kasih dan rekonsiliasi, tanpa mengeksplorasi potensi teologi penciptaan sebagai titik temu lintas iman. Padahal, mandat kerja dalam Kejadian 1:28 menawarkan perspektif yang berbeda karena ia berbicara tentang tanggung jawab universal manusia terhadap ciptaan, sebuah panggilan yang melampaui batas-batas doktrinal dan dapat menjadi bahasa bersama bagi pemeluk berbagai agama. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan perspektif baru yang berbasis pada mandat budaya (*cultural mandate*).

Bertolak dari celah tersebut, artikel ini mengajukan tafsir ulang terhadap Kejadian 1:28, dengan fokus pada kata *kabash* dan *radah*, sebagai fondasi teologis bagi moderasi beragama yang lebih praktis dan inklusif di Indonesia. Mandat kerja memanggil seluruh umat manusia apa pun agamanya, untuk mengelola dan merawat bumi sebagai rumah bersama. Dengan kata lain, mandat ini menawarkan "bahasa bersama" yang melampaui batas-batas teologis.

LANDASAN TEORI

Moderasi Beragama dalam Wacana Kontemporer

Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) mendefinisikan moderasi beragama sebagai sikap dan cara pandang dalam beragama yang menekankan keseimbangan, sehingga terhindar dari ekstremisme dan sikap fanatik yang berlebihan. Istilah "moderasi" sendiri berasal dari kata Latin *moderatio*, yang berarti kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Dalam konteks beragama, moderasi berarti menjalankan ajaran agama secara proporsional, tidak ekstrem kanan (fundamentalist) dan tidak ekstrem kiri (liberal).

Penting untuk dicatat bahwa moderasi di sini bukan berarti bersikap netral secara pasif. Moderasi bukanlah sikap *tidak peduli* atau *tidak punya pendirian*. Sebaliknya, moderasi adalah komitmen aktif untuk menghormati hak-hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Seorang Muslim yang moderat tidak akan merusak gereja, sama seperti seorang Kristen yang moderat tidak akan melecehkan masjid. Moderasi adalah keberanian untuk tetap teguh pada keyakinan sendiri sambil memberikan ruang yang sama bagi keyakinan orang lain.(2019).

Moderasi Beragama dalam Perspektif Kristen

Dalam etika Kristen, moderasi beragama berakar pada nilai-nilai kasih, keadilan, dan *shalom* (damai sejahtera) sebagaimana diajarkan dalam Alkitab. Heriyanto (Heriyanto, 2025) menjelaskan bahwa etika Kristen mengajarkan pengikut Kristus untuk mengasihi sesama tanpa syarat, termasuk mereka yang berbeda keyakinan. Perintah *Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri* (Matius 22:39) menjadi fondasi bagi sikap hormat terhadap pemeluk agama lain.

Namun, kritik yang sering dilontarkan terhadap diskursus moderasi beragama adalah bahwa ia kerap terjebak pada tataran etis-normatif tanpa menyediakan jembatan praktis yang memungkinkan kolaborasi nyata antarumat beragama. Heriyanto (Heriyanto, 2025) mengakui bahwa etika kasih Kristen, meskipun universal dalam klaimnya, tetap terikat pada narasi teologis yang khas Kristen sehingga sulit menjadi 'bahasa bersama' dalam dialog lintas iman. Akibatnya, moderasi beragama sering kali hanya menjadi slogan tanpa implementasi yang konkret di lapangan. Banyak program kerukunan antarumat beragama yang hanya berhenti pada kegiatan silaturahmi seremonial, tanpa menyentuh isu-isu struktural yang menjadi akar konflik.

Mandat Kerja dalam Kejadian 1:28

Kejadian 1:28 merupakan teks sentral dalam teologi penciptaan. Bunyinya dalam Alkitab Terjemahan Baru (LAI, 2021): *Beranak-cuculah dan bertambah banyak, penuhilah*

bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.

Ayat ini sering disebut sebagai *cultural mandate* atau mandat budaya, perintah Allah kepada manusia untuk mengelola dan mengembangkan ciptaan. Istilah "cultural mandate" pertama kali dipopulerkan oleh para teolog Reformed seperti Abraham Kuyper dan Herman Bavinck, yang menekankan bahwa manusia dipanggil untuk mengembangkan kebudayaan sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah (Sutanto, 2023).

Mandat Kerja sebagai Panggilan Primordial

Salah satu kesalahpahaman yang umum terjadi dalam teologi Kristen adalah anggapan bahwa kerja adalah konsekuensi dari kejatuhan manusia dalam dosa. Banyak orang Kristen berpikir bahwa sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka hanya bersukacita di taman Eden tanpa perlu bekerja. Baru setelah kejatuhan, Allah menghukum mereka dengan kerja keras: "Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu" (Kejadian 3:19).

Pandangan ini keliru. Saucy (Saucy, 2017) dengan tegas menegaskan bahwa kerja bukanlah konsekuensi dari kejatuhan, melainkan bagian yang melekat pada kodrat manusia sebagai gambar Allah (*imago Dei*). Saucy mengutip John Stott yang menyatakan bahwa kerja adalah pengeluaran energi, baik manual, mental, atau keduanya, dalam pelayanan kepada sesama, yang membawa kepuasan bagi pekerja, manfaat bagi komunitas, dan kemuliaan bagi Allah. Dengan kata lain, kerja adalah panggilan ilahi yang primordial, sudah ada sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Yang berubah setelah kejatuhan bukanlah realitas kerja itu sendiri, melainkan kondisi kerja yang menjadi lebih berat dan penuh pergumulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teologis-biblika. Sumber data primer adalah teks Kejadian 1:28 dalam bahasa Ibrani (*Biblia Hebraica Stuttgartensia*, 1997). Sumber sekunder meliputi berbagai literatur teologis dari pakar dalam dan luar negeri, artikel jurnal ilmiah terindeks, serta dokumen-dokumen gerejawi seperti ensiklik *Laudato Si'* dari Paus Fransiskus (Fransiskus, 2015).

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah eksegesis terhadap kata kunci *kabash* dan *radah*, yaitu dengan menelusuri penggunaan kata-kata tersebut dalam Perjanjian Lama serta membandingkannya dengan konteks budaya Timur Dekat kuno (Wibowo, 2025). Tahap kedua adalah sintesis teologis tentang hubungan antara mandat kerja dan moderasi beragama. Tahap ketiga adalah aplikasi kontekstual dalam kerukunan lintas iman di Indonesia.

Sumber Data

Sumber data primer penelitian ini adalah teks Kejadian 1:28 dalam bahasa Ibrani (*Biblia Hebraica Stuttgartensia*, 1997). Penggunaan teks asli bahasa Ibrani sangat penting karena terjemahan dalam berbagai bahasa (termasuk bahasa Indonesia) sering kali tidak mampu menangkap nuansa makna dari kata-kata aslinya.

Sumber sekunder meliputi berbagai literatur teologis dari pakar dalam dan luar negeri. Beberapa karya utama yang digunakan antara lain: *The Liberating Image* karya Middleton (Middleton, 2005), *Creation Regained* karya Wolters (Wolterstorff, 1983), *The Other Six Days* karya Stevens (Steven, 1999), serta berbagai artikel jurnal ilmiah terindeks seperti *Journal of the Evangelical Theological Society* dan jurnal-jurnal teologi lokal. Seperti yang diungkapkan Middleton (Middleton, 2005), "For two thousand years, Christians have been intrigued by the somewhat enigmatic *Imago Dei* references in the book of Genesis. Much

theological ink has been spilled mulling over the significance and meaning of these words: 'Let us make humanity in our image, according to our likeness.'

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen-dokumen gerejawi seperti ensiklik *Laudato Si'* dari Paus Fransiskus (Fransiskus, 2015) serta laporan-laporan dari Komnas HAM (HAM, 2025a) dan Setara Institute tentang kondisi kebebasan beragama di Indonesia.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah eksegesis terhadap kata kunci *kabash* dan *radah*. Eksegesis dilakukan dengan menelusuri penggunaan kata-kata tersebut dalam Perjanjian Lama (*concordance study*), menganalisis akar kata dan bentuk gramatikalnya, serta membandingkannya dengan konteks budaya Timur Dekat kuno (Wibowo, 2025). Tahap kedua adalah sintesis teologis, yaitu menghubungkan temuan eksegesis dengan konsep moderasi beragama. Pada tahap ini, penulis membangun argumen tentang relevansi mandat kerja dengan kerukunan lintas iman. Tahap ketiga adalah aplikasi kontekstual. Temuan-temuan teoretis kemudian diterapkan dalam konteks Indonesia, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-budaya dan politik yang ada.

PEMBAHASAN

Tafsir Kejadian 1:28: Menggali Makna Otentik Mandat Kerja

Sebelum membangun argumen tentang relevansi mandat kerja bagi moderasi beragama, penting untuk memahami makna teologis dari Kejadian 1:28 secara tepat. Sebab, kesalahan tafsir terhadap ayat ini, yang selama berabad-abad digunakan untuk membenarkan eksploitasi alam, telah menjadi salah satu akar krisis ekologis global.

Kritik paling terkenal terhadap tafsir tradisional Kejadian 1:28 datang dari White, (White, 1892). Dalam artikelnya yang sangat berpengaruh, *The Historical Roots of Our Ecologic Crisis*, White menuduh bahwa interpretasi antroposentris atas Kejadian 1:28 telah memperburuk sikap eksploitatif manusia terhadap alam. Menurut White, ajaran Kristen tentang dominasi manusia atas alam menjadi legitimasi teologis bagi eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran di dunia Barat. White dengan tegas menyatakan bahwa penyelesaian krisis tidak dapat datang dari sains dan teknologi itu sendiri, karena keduanya telah tercemar oleh sikap arogan Kristen terhadap alam. Karena akar masalahnya bersifat religius, maka obatnya pun harus bersifat religius. (White, 1892).

Namun, tafsir kontemporer menunjukkan bahwa pembacaan seperti itu sebenarnya keliru. White dan para kritikusnya telah membaca Kejadian 1:28 secara terisolasi dari keseluruhan narasi Alkitab. Setidaknya ada tiga lapis makna dalam mandat Kejadian 1:28 yang harus dipahami secara utuh.

Lapis Makna Pertama: Imago Dei

Lapis makna pertama dan yang paling mendasar adalah bahwa mandat kerja melekat pada identitas manusia sebagai gambar Allah (*imago Dei*). Kejadian 1:26-27 dengan tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan *menurut gambar dan rupa Allah* sebelum perintah untuk *menguasai* diberikan.

Urutan ini sangat penting. Ini berarti bahwa kekuasaan manusia atas ciptaan tidak bersifat absolut dan tanpa batas. Kekuasaan manusia adalah kekuasaan representasional, kekuasaan yang mencerminkan kekuasaan Allah sendiri. Manusia tidak bertindak atas namanya sendiri, melainkan sebagai wakil (*viceroy*) dari Sang Raja semesta.

Middleton (Middleton, 2005) memberikan penjelasan yang sangat berharga tentang konsep *imago Dei* dalam konteks Timur Dekat kuno. Middleton menjelaskan bahwa di

Mesopotamia dan Mesir kuno, raja-raja sering menempatkan patung-patung (*images*) di wilayah taklukannya. Patung ini bukan sekadar hiasan, melainkan simbol kehadiran dan otoritas raja. Di mana patung itu berada, di situ raja hadir dan otoritasnya berlaku (Middleton, 2005, pp. 107-110). Dalam konteks ini, ketika Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan sebagai gambar Allah, maka manusia ditempatkan di bumi sebagai patung Allah sebagai representasi kehadiran dan otoritas Allah. Tugas manusia adalah menjalankan pemerintahan Allah di bumi, bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kesejahteraan seluruh ciptaan.

Lapis Makna Kedua: Penatalayanan yang Bertanggung Jawab

Lapis makna kedua adalah bahwa kata *kabash* dan *radah* mengandung makna penatalayanan yang bertanggung jawab, bukan dominasi sewenang-wenang. Analisis linguistik yang cermat terhadap kedua kata ini menunjukkan bahwa tafsir tradisional yang keliru telah memperlakukan kata-kata ini seolah-olah bermakna *eksploitasi* atau *penindasan*.

Mari kita lihat kata *kabash* (כָּבַשׁ) terlebih dahulu. Secara etimologis, kata ini memang berarti *menaklukkan* atau *menguasai*. Namun, dalam penggunaannya di Perjanjian Lama, *kabash* lebih sering berarti *mengelola secara bijaksana* daripada *mengeksplorasi secara destruktif*. Wibowo (Wibowo, 2025) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *kabash* digunakan dalam Yeremia 34:16 untuk menggambarkan tindakan para bangsawan Yehuda yang *menaklukkan* budak-budak mereka, bukan dalam arti memperbudak, tetapi dalam arti memulihkan kebebasan mereka. Ini adalah contoh yang menarik: kata yang sama bisa berarti *menundukkan*, tetapi dalam konteks pembebasan (Wibowo, 2025).

Dalam Yosua 18:1, *kabash* digunakan untuk menggambarkan bagaimana orang Israel *menundukkan* tanah Kanaan. Di sini, yang dimaksud bukanlah merusak tanah, tetapi menguasainya sehingga dapat dihuni dan dikelola. Ini mirip dengan petani yang *menaklukkan* tanah dengan cara mengolahnya, membajak, menanam, dan merawat, agar tanah menghasilkan buah.

Sementara itu, kata *radah* (רָדָה), yang sering diterjemahkan *memerintah* atau *berkuasa*, secara konsisten digunakan dalam Perjanjian Lama untuk menggambarkan kekuasaan raja yang adil. Dalam Mazmur 72, yang menggambarkan pemerintahan Mesias yang ideal, *radah* digunakan untuk menggambarkan kekuasaan yang membawa keadilan bagi orang miskin dan menghancurkan penindas (ayat 4). Ini bukan kekuasaan tiran, melainkan kekuasaan pastoral. Sari menambahkan bahwa dalam Imamat 25:43 dan 46, *radah* secara eksplisit dilarang dilakukan dengan kekejaman. Allah memerintahkan: *Janganlah engkau memerintah (radah) dia dengan kejam, tetapi engkau harus takut akan Allahmu*. Fakta bahwa ada larangan menggunakan *radah* dengan kejam menunjukkan bahwa *radah* sendiri tidak berarti kejam. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang lembut dan penuh perhatian, seperti gembala yang memimpin dan merawat ternaknya (N.I, 2022).

Lapis Makna Ketiga: Komunal dan Lintas Generasi

Lapis makna ketiga adalah bahwa mandat kerja bersifat komunal dan lintas generasi. Perintah *beranak cuculah dan bertambah banyak* serta *penuhilah bumi* menunjukkan bahwa mandat ini tidak diberikan kepada individu secara soliter, melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai komunitas.

Tidak ada seorang pun, sendirian, yang dapat memenuhi bumi atau menaklukkan seluruh ciptaan. Mandat ini membutuhkan kerja sama antargenerasi dan antarmanusia. Seorang petani menanam pohon yang mungkin baru akan berbuah puluhan tahun kemudian, yang dinikmati oleh generasi cucunya. Seorang ilmuwan melakukan penelitian yang mungkin baru akan diterapkan oleh generasi berikutnya. Prasetyo dan Nesimnasi (Prasetyo & Nesimnasi, 2025) menegaskan bahwa kerja sama, dalam perspektif

mandat Kejadian 1:28, bukanlah pilihan melainkan keharusan teologis. Karena mandat diberikan kepada seluruh umat manusia, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim bahwa ia bekerja untuk dirinya sendiri. Seluruh kerja pada akhirnya adalah kerja bersama untuk kesejahteraan seluruh ciptaan.(Prasetyo & Nesimnasi, 2025).

Mandat Kerja sebagai Titik Temu Lintas Iman

Setelah memahami makna otentik dari mandat kerja dalam Kejadian 1:28, pertanyaan selanjutnya adalah: mengapa mandat ini bisa menjadi landasan bagi moderasi beragama lintas iman? Berikut adalah argumentasi teologis yang disusun secara bertahap.

Argumentasi Pertama: Praksis, Bukan Doktrin

Argumentasi pertama, dan yang paling fundamental, adalah bahwa mandat kerja berbicara tentang praksis, bukan doktrin. Selama ini, dialog antaragama kerap terhenti di level teologis karena setiap agama memiliki klaim kebenaran yang eksklusif.

Umat Kristen meyakini Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan (Yohanes 14:6). Umat Islam meyakini syahadat *Laa ilaaha illallah, Muhammadur rasulullah*. Umat Hindu memiliki konsep *dharma* yang berbeda dengan Buddha. Klaim-klaim seperti ini, di ranah doktrinal, sulit dan mungkin tidak perlu untuk disatukan. Setiap agama berhak memegang teguh keyakinannya masing-masing.

Namun, mandat kerja dalam Kejadian 1:28 tidak berbicara tentang apa yang harus diyakini. Mandat ini berbicara tentang apa yang harus dilakukan: *mengelola bumi, menjaga keseimbangan ekosistem*, bekerja untuk kesejahteraan bersama. Di level praksis inilah perbedaan doktrinal tidak lagi menjadi penghalang.

Seorang Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, atau Konghucu sama-sama membutuhkan air bersih. Mereka sama-sama bergantung pada tanah yang subur untuk menghasilkan makanan. Mereka sama-sama terdampak oleh banjir ketika hutan gundul, dan sama-sama menderita kekeringan ketika musim kemarau panjang. Dengan kata lain, bencana ekologis tidak diskriminatif dan solusinya pun tidak boleh diskriminatif. Seperti metafora yang indah dalam artikel ini: *air tidak bertanya kepada agama siapa yang meminumnya, dan tanah tidak peduli doa apa yang diucapkan di atasnya. Air dan tanah adalah ciptaan yang sama, yang dinikmati dan dirawat bersama oleh semua manusia, tanpa memandang agama*.

Argumentasi Kedua: Superordinate Goal

Argumentasi kedua adalah bahwa mandat kerja menciptakan kepentingan bersama (*common interest*) yang lebih kuat daripada identitas agama. Dalam teori resolusi konflik, salah satu strategi paling efektif untuk meredakan ketegangan antarkelompok identitas adalah menelusuri *superordinate goal*, tujuan bersama yang tidak dapat dicapai oleh satu kelompok saja tanpa kerja sama kelompok lain.

Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog sosial Muzafer Sherif dalam eksperimen *Robbers Cave* yang terkenal. Sherif menunjukkan bahwa dua kelompok anak laki-laki yang awalnya saling bermusuhan dapat dipersatukan ketika mereka dihadapkan pada masalah bersama yang membutuhkan kerja sama, seperti memperbaiki sumber air yang rusak (Sherman, 2020).

Mandat kerja dalam Kejadian 1:28, jika dipahami secara teologis, menyediakan *superordinate goal* semacam itu: memelihara bumi sebagai rumah bersama. Krisis ekologis tidak mengenal batas agama. Perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan kepunahan spesies adalah masalah yang menyentuh semua manusia tanpa kecuali.

Hal ini sejalan dengan seruan Paus Fransiskus dalam ensiklik *Laudato Si'*. Paus Fransiskus menekankan bahwa krisis ekologis merupakan panggilan bagi semua umat beriman, lintas agama, untuk bekerja sama menjaga *rumah kita bersama*. Dalam ensiklik tersebut, Paus

Fransiskus bahkan mengutip pandangan para pemimpin agama lain, termasuk Patriark Ekumenis Bartholomew (Kristen Ortodoks) dan tokoh-tokoh Islam.(Fransiskus, 2015).

Argumentasi Ketiga: Kerja sebagai Ibadah

Argumentasi ketiga adalah bahwa mandat kerja melembagakan *kerja sebagai ibadah* yang tidak memerlukan konversi. Dalam tradisi Kristen, kerja bukanlah aktivitas sekuler yang terpisah dari ibadah. Sebaliknya, kerja adalah bentuk penyembahan kepada Allah, *laborare est orare* (bekerja adalah berdoa).

Stevens (Steven, 1999) menekankan bahwa panggilan untuk bekerja bukan hanya milik pendeta atau biarawan, melainkan milik setiap orang percaya dalam kesehariannya. Stevens mengkritik dikotomi yang salah antara *pelayanan rohani (full-time ministry)* dan *pekerjaan duniawi* (sekuler). Menurutny, seorang petani yang membajak sawah, seorang guru yang mengajar anak-anak, seorang ibu rumah tangga yang mengasuh anak, semua sedang melayani Allah melalui panggilan mereka masing-masing. (Steven, 1999).

Yang menarik adalah bahwa konsep *kerja sebagai ibadah* juga ditemukan dalam tradisi agama lain. Dalam Islam, bekerja dengan niat mencari nafkah yang halal untuk keluarga adalah ibadah. Dalam Hindu, bekerja sesuai dengan *dharma* (kewajiban) adalah bagian dari jalan menuju *moksa*. Dalam Buddha, pekerjaan yang benar (*right livelihood*) adalah salah satu cabang dari Jalan Mulia Berunsur Delapan.

Ketika kerja dipahami sebagai ibadah, bekerja bersama dengan pemeluk agama lain tidak berarti menyetujui teologi mereka. Bekerja bersama berarti menghormati panggilan ilahi yang sama yang bekerja melalui cara-cara yang berbeda. Seorang Kristen yang bekerja dengan seorang Muslim di proyek penghijauan tidak sedang *beribadah bersama* dalam arti sinkretis, tetapi sedang menjalankan mandat Allah masing-masing di ladang yang sama.

Aplikasi dalam Konteks Moderasi Beragama di Indonesia

Setelah membangun fondasi teoretis, pertanyaan selanjutnya adalah: bagaimana mandat kerja dalam Kejadian 1:28 dapat diaplikasikan secara konkret dalam upaya moderasi beragama di Indonesia? Berikut adalah beberapa usulan aplikatif.

Pertama, gereja-gereja di Indonesia perlu mengembangkan teologi kerja yang lebih kuat dan inklusif. Selama ini, ajaran Kristen cenderung memisahkan *pelayanan rohani* (yang dianggap suci) dan *pekerjaan duniawi* (yang dianggap kurang bermakna). Pandangan dualistik seperti ini perlu dikoreksi. Keller (Keller, 2012) dengan tegas menyatakan bahwa setiap pekerjaan yang jujur, sekecil apa pun, memiliki martabat dan makna rohani. Keller menulis, tidak ada pekerjaan yang hanya sekadar pekerjaan. Setiap pekerjaan, ketika dilakukan untuk Allah dan untuk kepentingan sesama, adalah tindakan ibadah.(Keller, 2012). Jika kerja adalah mandat Allah sejak penciptaan, maka setiap orang Kristen yang bekerja, baik sebagai petani, guru, nelayan, buruh pabrik, atau pegawai kantor, sedang menjalankan panggilan ilahi. Pengakuan ini membuka peluang untuk berkolaborasi dengan pemeluk agama lain di tempat kerja. Kolaborasi ini bukanlah kompromi teologis, melainkan perwujudan bersama dari panggilan ilahi yang sama.

Kedua, gereja dan lembaga keagamaan lainnya dapat memprakarsai proyek-proyek ekologis bersama. Jika mandat kerja dalam Kejadian 1:28 dipahami sebagai penatalayanan ekologis, maka konsekuensi praktisnya adalah perlunya tindakan nyata untuk menjaga lingkungan. Gereja, masjid, pura, vihara, dan kelenteng dapat bekerja sama dalam berbagai proyek ekologis. Contohnya: proyek penghijauan di lahan kritis, pengelolaan sampah berbasis komunitas, konservasi daerah aliran sungai, atau kampanye pengurangan plastik sekali pakai. Dalam proyek semacam itu, perbedaan doktrin tidak lagi relevan. Yang terpenting adalah bagaimana bersama-sama merawat ciptaan yang sama. Wirzba (Wirzba, 2021) mengamati bahwa proyek ekologis sering kali menjadi *jembatan* yang efektif untuk membangun hubungan

antarumat beragama. Wirzba menulis, ketika orang-orang dari berbagai agama bekerja bersama untuk membersihkan sungai atau menanam pohon, mereka secara tidak sadar sedang membangun kepercayaan dan rasa hormat satu sama lain. Mereka mulai melihat sesama bukan sebagai *yang lain*, tetapi sebagai mitra dalam panggilan bersama. (Wirzba, 2021).

Ketiga, pendidikan teologi di seminari dan sekolah-sekolah teologi perlu memasukkan moderasi beragama berbasis mandat kerja ke dalam kurikulum. Selama ini, pendidikan teologi di Indonesia cenderung berfokus pada doktrin, sejarah gereja, dan bahasa-bahasa Alkitab, tanpa memberikan perhatian yang memadai pada isu-isu lintas iman dan ekologi. Heriyanto (Heriyanto, 2025) menyarankan bahwa seminari-seminari di Indonesia perlu membuka mata terhadap realitas sosiologis Indonesia yang majemuk. Kurikulum yang hanya berorientasi pada kebutuhan internal gereja akan menghasilkan lulusan yang cakap secara teologis tetapi buta secara sosial. Sebaliknya, kurikulum yang mengintegrasikan isu-isu lintas iman dan ekologi akan menghasilkan pendeta dan pemimpin Kristen yang mampu menjadi agen kerukunan di masyarakat.

Dengan memasukkan Kejadian 1:28 sebagai fondasi teologis bagi moderasi beragama, calon pendeta dan pemimpin gereja akan memiliki landasan yang kokoh untuk membangun dialog dan kerja sama lintas iman. Mereka tidak lagi melihat pemeluk agama lain sebagai *musuh* atau *target misi*, tetapi sebagai mitra dalam merawat ciptaan.

Keempat, gereja dan organisasi Kristen dapat melakukan advokasi kebijakan yang berbasis pada mandat kerja. Pemerintah daerah dan pusat perlu didorong untuk mengalokasikan sumber daya bagi program-program kolaboratif lintas iman, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Komnas HAM (HAM, 2025) mencatat bahwa salah satu akar masalah intoleransi adalah lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kebebasan beragama. Advokasi berbasis mandat kerja dapat menjadi pintu masuk untuk menekan pemerintah agar lebih serius dalam menangani isu-isu lintas iman. Argumennya sederhana: negara berkewajiban melindungi warganya, termasuk dalam menjalankan mandat kerja mereka. Jika seorang petani Muslim dan seorang petani Kristen ingin bekerja sama mengolah lahan kritis, negara harus hadir untuk memfasilitasi, bukan menghalangi.

KESIMPULAN

Ringkasan Temuan

Artikel ini telah menunjukkan bahwa mandat kerja Allah dalam Kejadian 1:28 memiliki potensi besar untuk menjadi landasan teologis bagi moderasi beragama di Indonesia. Melalui tafsir yang cermat terhadap kata *kabash* dan *radah*, ditemukan bahwa inti dari mandat ini bukanlah dominasi, melainkan penatalayanan yang bertanggung jawab atas ciptaan.

Tiga lapis makna dalam mandat Kejadian 1:28 telah diidentifikasi. *Pertama*, mandat kerja melekat pada identitas manusia sebagai gambar Allah (*imago Dei*), yang berarti bahwa kekuasaan manusia bersifat representasional dan bertanggung jawab (Middleton, 2005). *Kedua*, kata *kabash* dan *radah* mengandung makna penatalayanan pastoral, bukan eksploitasi tiranis (Wibowo, 2025). *Ketiga*, mandat kerja bersifat komunal dan lintas generasi, membutuhkan kerja sama antarmanusia. (Prasetyo & Nesimnasi, 2025).

Makna-makna inilah yang menjadi titik temu lintas iman. Setiap agama, dengan caranya masing-masing, mengajarkan pentingnya menjaga alam dan bekerja untuk kesejahteraan bersama. Karena itu, mandat kerja Kejadian 1:28 dapat menjadi *bahasa bersama* yang melampaui batasan doktrinal.

Kontribusi Teoretis

Kontribusi utama artikel ini terhadap diskursus moderasi beragama adalah pergeseran basis dialog dari *kesamaan keyakinan* menuju *kesamaan praksis*. Jika selama ini dialog antaragama sering terhenti karena perbedaan doktrinal yang tidak dapat dipertemukan, maka mandat kerja dalam Kejadian 1:28 menawarkan jalan keluar: bekerja bersama untuk bumi yang sama.

Pergeseran ini penting karena mengakui realitas bahwa perbedaan doktrinal adalah sesuatu yang tidak perlu (dan tidak mungkin) dihilangkan. Orang Kristen tidak perlu berhenti meyakini Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, dan orang Islam tidak perlu berhenti mengucapkan syahadat. Namun, di atas semua perbedaan itu, mereka tetap dapat bekerja bersama.

Banjir, kekeringan, polusi, dan krisis iklim tidak peduli siapa yang berdoa dengan cara apa, dan karena itu, penanganannya pun harus melampaui batas-batas agama. Krisis ekologis adalah panggilan universal yang menuntut respons universal.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan. *Pertama*, artikel ini lebih bersifat teoretis dan belum menguji secara empiris efektivitas model moderasi berbasis mandat kerja ini di lapangan. Apakah proyek ekologis lintas iman benar-benar dapat mengurangi ketegangan antaragama? Pertanyaan ini membutuhkan penelitian lapangan dengan metode kualitatif (wawancara mendalam, observasi partisipan) atau bahkan eksperimen sosial. *Kedua*, fokus artikel ini pada perspektif Kristen, sehingga perlu penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi bagaimana mandat serupa dalam tradisi agama lain dapat diintegrasikan. Apakah Al-Qur'an memiliki konsep yang setara dengan *cultural mandate*? Bagaimana dengan Tripitaka, Weda, atau kitab suci Konghucu? Penelitian komparatif semacam itu akan memperkaya basis teoretis moderasi beragama. *Ketiga*, tantangan implementasi di tingkat akar rumput, termasuk resistensi dari kelompok eksklusivis, masih perlu dikaji lebih mendalam. Bagaimana cara meyakinkan kelompok-kelompok yang sangat eksklusif (bahkan ekstrem) untuk berpartisipasi dalam proyek kolaboratif lintas iman? Ini adalah pertanyaan praktis yang tidak mudah dijawab.

Agenda Penelitian ke Depan

Ke depan, penelitian empiris tentang program-program kolaborasi lintas iman berbasis ekologi sangat diperlukan. Misalnya, studi kasus tentang proyek desa sadar lingkungan yang melibatkan berbagai komunitas agama dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kolaborasi semacam itu.

Selain itu, studi komparatif tentang mandat penatalayanan alam dalam kitab suci berbagai agama akan memperkaya basis teoretis bagi moderasi beragama berbasis kerja sama. Penelitian semacam ini bisa melibatkan para ahli tafsir dari berbagai tradisi agama untuk berdialog dan saling belajar.

Pada akhirnya, tujuan dari semua ini sederhana namun monumental: *menjaga Indonesia sebagai rumah bersama bagi semua anak bangsa, tanpa memandang agama yang mereka panjatkan di dalam rumah-rumah ibadah mereka yang berbeda*. Mandat kerja dalam Kejadian 1:28 mengingatkan kita bahwa sebelum kita adalah orang Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, atau Konghucu, *kita terlebih dahulu adalah manusia yang dipanggil untuk mengelola dan merawat bumi, dan panggilan itu adalah panggilan bersama*.

DAFTAR PUSTAKA

Fransiskus, P. (2015). Ensiklik Laudato Si'. Vatikan: Libreria Editrice Vaticana.

- HAM, K. (2025a). Komnas HAM mengecam keras tindakan intoleransi dan persekusi atas nama agama.
- HAM, K. (2025b). Komnas HAM Mengecam persekusi atas peserta retreat remaja Kristen dan perusakan rumah singgah di Cidahu, Sukabumi. Komnas HAM.
<https://www.komnasham.go.id/>
- Heriyanto, Y. Y. (2025). Moderasi Beragama dalam Perspektif Etika Kristen: Menemukan titik temu dalam perbedaan (Bag. 3). *Journal of Social Science Research*, 5.
- Keller, T. (2012). *Every Good Endeavor: Connecting Your Work to God's Work*. New York: Dutton.
- Kemenag. (2019). Moderasi.
- Middleton, R. (2005). *The Liberating Image: The Imago Dei in Genesis 1*. Brazos Press: Grand Rapids, Mich.
- N.I, S. (2022). Perintah taklukanlah dan berkuasalah dan implikasinya bagi lingkungan hidup (Bag. 4). *ARYA SATYA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2.
- Prasetyo, E., & Nesimnasi, R. (2025). Pemeliharaan Ciptaan dan Mandat Penatalayanan Ekologis Menurut Kejadian 1:26-28 (Bag. 1). *Jurnal Pendidikan*, 9.
- Saucy, M. R. (2017). *Storied Work: The Eschatology Turn and The Meaning Of Our Work* (Bag. 1). 60.
- Sherman, S. (2020). *Superordinate Goals and Intergroup Conflict Resolution*.
- Steven, R. P. (1999). *The Other Six Days: Vocation, Work, and Ministry In Biblical Perspective*. Grand Rapids, Eerdmans.
- White, E. G. (1892). *Gospel Workers*. Review and Herald Publishing Association, Battle Creek, MI (USA).
- Wibowo, D. R. (2025). Makna “Kabash” dan “Radah” dalam Kejadian 1:28: Implikasi Teologis untuk Pelestarian Lingkungan di Era Kontemporer (Bag. 1). 1, 12–21.
- Wirzba, N. (2021). *This Sacred Life*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wolterstorff, N. (1983). *Until Justice and Peace Embrace*. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company.